

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, M. *Hukum Pidana Lingkungan*. Depo, Rajawali press. 2020
- Ary, Donald. *Introduction to Research in Education*, Usaha Nasional, Surabaya
- Budiyono, Muhtadi, Ade Firmansyah. "*Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah*." Kanun Jurnal Ilmu Hukum 17, No. 67, 2015
- Burlian, Paisol. *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, NoerFikri, Palembang, 2014
- Efendi, Lutfi. *Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayumedia Sakti Group, Malang, 2004
- Erwin, Muhamad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (PT. Rafika Aditama Bandung 40254) Cetakan Ketiga 2011
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Hariyadi, Dwi. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Bangka Belitung UBB Press, 2018
- Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Cet. Ke-1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, ed. Sinar grafika, ke-1. Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta 2012
- Hs, Salim. *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2005

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi,:
Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017

Kotijah, Siti. *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, CV
MFA, Samarinda, 2020

Marbun, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta: 1987

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 5, Kencana, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010

MD, Moh Mahfud. *Pergulatan Politik Dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta:
Gama Media, 1999

Monteiro, Josef Mario. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia,
Yogyakarta, 2016

Mukti, Hudali. *Perizinan Pertambangan Batubara Terintegrasi dalam
Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, CV. Budi Utama,
Yogyakarta, 2022

Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing,
Jakarta, 2015

Nugroho, Hanan. *Pertambangan Energi Dan Pertambangan Indonesia;
Kebijakan Dan Tantangannya*, Bogor: IPB Press, 2022

Rahyunir, Dr. H. Rauf, M.Si., *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Zanafa
publishing, Pekanbaru Riau, 2018

Ramlan Dan Muhammad Yusrizal, *Hukum Perizinan Proses Pendirian Dan
Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek*, Medan: Ratu Jaya, 2012

Rosadi, Oton. *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum
Pancasila; dialektika dan keadilan sosial*, Jakarta: Thafa Media, 2012

Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*, UII Pres, Yogyakarta, 2004

Sudjana, H. Nana, H. Awal Kusumah. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2000

Sudrajat, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintahan Otoritas Dan Jabatan*, Sinar Grafika Jakarta, 2017

Tinambunan, R. Sondang. *Resentralisasi Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Terhadap Pasal 10 Ayat 5 Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)*, Jurnal Untan, Pontianak, 2013

Wedi, Rahayu. “*Konsep Kepemilikan Dalam Islam*”, Artikel Dosen Hukum Ekonomi Syariah Universitas Asy`Ari Tebuireng Jombang

Yulianingrum, Aullia Vivi. “*Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Berbasis Kesejahteraan Profetik*.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021

B. Jurnal, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah Jurnal

Al-Farisi, Muhammad Salman, “*Desentralisasi Kewenangan pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*”, Jurnal Ilmiah Ecosystem, Vol 21, No. 1, Januari – April 2021

Jailani, *Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Perspektif Desentralisasi*, Jurnal Tana Mana, Vol. 4, No. 1, June 2023

Lintar, Suitoh Ali. *Implementasi Pemberian Izin Pertambangan di Wilayah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara*, Journal of Social Politics and Public Administration, Vol. 01, No. 02, August 2024

Paransi, Marlinda Eva. *Tinjauan Yuridis Pendelegasian Wewenang Dalam Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Lex Administratum Vol. 12, No. 2 Apr 2024

Prasetio, Teguh. *Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Jurnal Kertha Semaya, Bali, 2021

Soedarso, Bambang Prabowo. "Potret Hukum Pertambangan di Indonesia dalam Era UU No. 4 Tahun 2009." *Indonesian Journal of International Law* Vol. 6, No. 3 (April 30, 2009).

Utama, I Made Arya, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan*, Jurnal Hukum Pascasarjana Unpad, Bandung, 2008

Tesis

Shalihin, Iqbal. *Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2022.

Johan, *Perizinan Berusaha Didaerah Dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2022.

Aulia, Kevin. *Analisis Yuridis Implementasi Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batubar Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad 1847 No. 23.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

D. Media Elektronik/ Internet

Universitas Sam Ratulangi Manado, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55155/46158>, diakses pada hari Rabu, 10 September 2025 pukul 16.30.

Universitas Bangka Belitung, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/12847/6496>, diakses pada hari Rabu, 10 September 2025 pukul 16.45

Universitas Andalas Padang, <http://scholar.unand.ac.id/34679/5/tesis%20full.pdf>, diakses pada hari Rabu, 10 September 2025, pukul 17.00

Lampiran III Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral. https://jdih.esdm.go.id/storage/document/3_Lampiran%20III%20Permen%205%202021_Minerba_salinan.pdf. Diakses 15 September 2025 Pukul 13.00